

OIKUMENE DAN RELASI SOSIAL

Membangun Perjumpaan Sejati Agama-Agama di Maluku

Dalam Perspektif Etika Kristiani

Costantinus Fatlolon, SS., MA

Dosen Filsafat STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon

ABSTRAK

This article presents a discourse on oecumene which is not restricted to “ecclesiastical oecumene”, but which intends to submit its metamorphosis into “inter-religious oecumene”, as a result of the phenomenon of the outset of the awareness of global ecumenism. The basic supposition of the article is that the “Oecumene between Churches” now constitute a real meeting-point of “inter-religious oecumene” in the Moluccas, when based on global ethics. In this way, various religions can live and cooperate in a sincere way, in peace and free from any intimidation or coercion for the sake of universal humanism. This article is also meant to be a critical reflection on the Decree *Unitatis Redintegratio* from the viewpoint of christian ethics.

KATA-KATA KUNCI:

Ekumene, Relasi Sosial, Etika Kristiani

Pendahuluan

Diskursus tentang ekumene pada millenium ketiga masehi tidak lagi terbatas pada “ekumene Gereja-Gereja” melainkan telah bermetamorfosa menjadi “ekumene agama-agama”. Munculnya fenomena “kebangkitan kesadaran ekumenis secara global” menandai model ekumene ini dengan jangkauan sampai pada penghayatan keagamaan setiap orang dalam relasi sosial masyarakat yang semakin global dan berubah-ubah.

Fenomena sosial ini, di satu pihak, merupakan sebuah *imperatif etis-moral* bagi agama-agama agar semakin transformatif, inklusif, dan komunikatif melakukan proses belajar bersama demi masa depan dunia dan manusia.¹ Namun, di pihak lain, fenomena ini semakin ditantang seiring menguatnya realitas sosial khaotik seperti fanatisme agama yang berlebihan, konflik agama, fundamentalisme dan terorisme dalam dunia modern dewasa ini.²

Pertanyaan yang kemudian muncul ialah bagaimana “ekumene Gereja-Gereja” dapat membangun perjumpaan sejati agama-agama menuju sebuah “ekumene agama-agama” di Maluku di tengah realitas sosial yang khaotik dewasa ini? Tulisan ini mempertahankan tesis bahwa “ekumene Gereja-Gereja” dapat menjadi wadah atau sarana perjumpaan sejati “ekumene agama-agama” di Maluku apabila berlandaskan sebuah etika global. Dengan istilah etika global dimaksudkan, sebagaimana dikatakan oleh Hans Kung, “*a minimum of common value, norms and attitudes*” dengan tujuan “membangun perdamaian sejati dan untuk “mengobati” dunia yang mengalami krisis makna, nilai dan norma.”³ Dalam bingkai etika itu agama-agama dapat hidup dan bekerjasama secara jujur, damai dan bebas-paksaan demi kemanusiaan universal.

¹St. Sunardi, “Dialog: Cara Baru Beragama. Sumbangan Hans Küng bagi Dialog Antaragama,” dalam Elga Sarapung, et al (eds.), *Dialog: Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), 85-87.

²Bdk. The Parliament of the World’s Religions, *A Global Ethics: The Declaration of the Parliament of the World’s Religions*, with commentaries by Hans Küng and Karl-Josef Kuschel, (New York: Continuum, 2004), 17. Lih. Karen Armstrong, *The Battle for God* (New York: Random House, 2000), xii.

³Dikutip dalam St. Sunardi, *Ibid.*, 101.

Untuk mengelaborasi thesis tersebut, tulisan ini mendasarkan diri pada Dekrit Konsili Vatikan II tentang Kegiatan Ekumene, *Unitatis Redintegratio (UR)* ditinjau dari perspektif etika kristiani. Tulisan ini terbagi atas tiga bagian. Pertama: Pengertian dan Sejarah Ekumene Menurut Gereja Katolik. Kedua, Prinsip dan Tujuan Ekumene Gereja Katolik. Ketiga, Menuju Perjumpaan Sejati Agama-Agama di Maluku. Pada akhir pembahasan diberikan sebuah penutup sebagai kesimpulan.

1. Pengertian dan Sejarah Gerakan Ekumene Gereja Katolik

1.1. Pengertian Ekumene

Dalam perspektif Gereja Katolik, ekumene pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk mengusahakan persekutuan umat Kristen di seluruh dunia. Konsili Vatikan II mengungkapkan: “Yang dimaksudkan dengan ‘Gerakan Ekumenis’ ialah: kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha, yang – menanggapi bermacam-macam kebutuhan Gereja dan berbagai situasi – diadakan dan ditujukan untuk mendukung kesatuan umat Kristen” (UR 4).

Persatuan dan kesatuan umat Kristen terutama adalah kehendak Kristus sendiri bagi Gereja. “Sebab yang didirikan oleh Kristus Tuhan ialah Gereja yang satu dan tunggal. Sedangkan banyak persekutuan Kristen membawakan diri sebagai pusaka warisan Yesus Kristus yang sejati bagi umat manusia. Mereka semua mengaku sebagai murid-murid Tuhan, tetapi berbeda-beda pandangan dan menempuh jalan yang berlain-lainan pula, seolah-olah Kristus sendiri terbagi-bagi” (UR 1).

Kenyataan adanya Gereja-Gereja dan Komunitas-Komunitas Kristen yang berlainan seperti Gereja Nestorian (431), Gereja Ortodoks Timur (1054), Lutheran dan berbagai denominasi Protestan (1517),

Anglikan (1534) dan sebagainya, yang disebabkan oleh alasan historis, dogmatis, praktis, bahkan juga sosial dan politik, pada dasarnya tidak sesuai dan bertentangan dengan kehendak Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Perpecahan tersebut “menjadi batu sandungan bagi dunia, serta merugikan perutusan suci, yakni mewartakan Injil kepada semua makhluk.” (UR 1).

Menurut hakekatnya Gereja adalah “satu dan tunggal” (UR 2). Allah tidak pernah menghendaki perpecahan dan perseteruan umat-Nya. Kehendak dasariah Allah adalah “persekutuan” (*koinonia*) dan “kebersamaan” (*communio*). Teologi *koinonia-communio* ini merupakan refleksi Konsili Vatikan II atas hidup dan karya Yesus sendiri (bdk. UR 2). Seluruh hidup dan karya, bahkan sebelum sengsara dan wafat-Nya di kayu salib, Yesus sendiri memohon kepada Bapa-Nya untuk kesatuan umat-Nya (bdk. Yoh 17:21). Ketika ditinggikan di kayu salib dan dimulainya, Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada umat (UR 2). Roh inilah yang membagikan aneka rahmat dan pelayanan dan memperlengkapi umat bagi pelayanan dan pembangunan Tubuh Mistik Kristus, yakni Gereja (bdk. Ef 4:12).

Dengan demikian, beta mulianya gerakan “ekumene Gereja” karena merupakan upaya mencontohi pola persatuan (*koinonia*) dan kebersamaan (*communio*) dari Trinitas Mahakudus sendiri. “Pola dan Prinsip terluhur misteri itu ialah kesatuan Allah Tri Tunggal dalam tiga Pribadi Bapa, Putera dan Roh Kudus.” (UR 2).

1.2. Sejarah Kegiatan Ekumene Gereja Katolik

Upaya Gereja Katolik untuk terlibat dalam gerakan ekumene telah dimulai pada Konsili Ekumenis di Lyon tahun 1274 dan Firense tahun

1439. Akan tetapi upaya awal ini kurang berkembang dan membawa hasil yang menggembirakan. Perkembangan yang lebih signifikan sangat didorong oleh lahirnya *World Council of Churches* (WCC) tahun 1948 dan Konsili Vatikan II tahun 1962-1965.

Dalam Sidang Raya WCC Ke-3 di New Delhi tahun 1962, WCC menyatakan dirinya sebagai “Persekutuan Konsilier dari Gereja-Gereja di lingkungan Gereja Protestan dan Ortodoks”. Pada saat itu, Gereja Katolik tidak menjadi bagian dari WCC dan belum merasakan kewajiban untuk terlibat dalam gerakan ekumene. Gereja Katolik menganggap bahwa umat Kristen lain memisahkan diri dari Gereja Universal maka mereka harus berusaha kembali ke pangkuan bunda Gereja yang utama. Sebagai tandanya, Paus Benediktus XV menolak menghadiri Sidang *Faith and Order* tahun 1919. Paus Pius XI bahkan menolak gerakan ekumenis Gereja-Gereja lain karena bercorak terlalu umum dan berkompromi dalam hal ajaran. Ia kemudian menolak menghadiri sidang-sidang ekumene internasional tahun 1948.⁴

Perubahan besar terjadi sejak Konsili Vatikan II. Paus Yohanes XXIII berjasa menghembuskan pembaharuan (*aggiornamento*) dalam Gereja Katolik dan berupaya mengatasi perpecahan umat Kristen. Maka para pemimpin Gereja Ortodoks, Anglikan, Protestan dan WCC diundang menghadiri Konsili Vatikan II. Pengakuan dan upaya kerja sama Gereja Katolik dan Gereja Kristen lain dinyatakan dalam Dekrit tentang Ekumenisme, *Unitatis Redintegratio* (UR) dan Konstitusi tentang Gereja dalam Dunia, *Gaudium et Spes* (GS). Kedua dokumen ini mengakui umat Kristen lain sebagai Gereja. Dengan demikian Konsili meletakkan dasar

⁴Adolf Heuken, *Ensiklopedi Gereja, Vol. I: A-G* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1991), 283-284.

baru kerja sama antara Gereja Katolik dengan Gereja-Gereja dan Persekutuan-Persekutuan Gerejani lainnya.⁵

Pengakuan ini kemudian diikuti oleh pembentukan “Sekretariat untuk Persatuan Umat Kristen” tahun 1960. Pada tahun 1964, Paus Paulus VI mengadakan pertemuan dengan Batrik Athenagorus dari Konstantinopel yang menghasilkan kesepakatan bersama pada tahun 1965 untuk menghapus ekskomunikasi antara Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks. Pada tahun 1965 Paus mengunjungi pusat WCC di Geneva, dan pada tahun 1982 Kepala Gereja Anglikan di Canterbury, Inggris. Gereja Katolik juga melakukan dialog ekumenis tingkat tinggi guna mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara Gereja-Gereja, secara resmi melalui pertemuan dengan Dewan Gereja-Gereja Methodis sejak tahun 1967, dengan Ikatan Reformasi Sedunia sejak tahun 1970, dengan *Disciples of Christ* sejak tahun 1977, dengan para wakil Gereja-Gereja Pantekosta sejak tahun 1972, dengan Ikatan Baptis Sedunia sejak tahun 1984.⁶

Kegiatan ekumenis mengalami perkembangan pesat pada masa pontifikal Paus Yohanes Paulus II. Pada masa awal kepemimpinannya, ia bertemu dengan para tokoh Gereja Lutheran di Roma, tahun 1992. Pada tahun 1984, Paus filsuf ini mengunjungi juga Gevena dan bertemu dengan Sekretaris Jenderal WCC, Philip Potter. Usaha ekumenis ini dinyatakan pula dalam kunjungannya ke Indonesia tahun 1989.

⁵Thomas E. Fitzgerald, *The Ecumenical Movement. An Introductory History* (New York: Greenwood Publishing Group, 2004), 127-128; bdk. Adolf Heuken, *Ibid.*, 284.

⁶Adolf Heuken, *Ibid.*, 284-285.

Dalam millennium ketiga ini, gerakan ekumene mendapatkan angin segar. Pada tanggal 9 Pebruari 2016 untuk pertama kalinya dalam 450 tahun kemudian terjadi pertemuan dan doa bersama antara Kardinal Vincent Nikolas, Ketua Konferensi Uskup Inggris dan Wales, dan Uskup Anglikan di London, Richard Chartres, di dalam Kapel Kerajaan Inggris.⁷ Pada hari Jumat 12 Pebruari 2016 Paus Fransiskus mengadakan pertemuan dengan Pemimpin Gereja Ortodoks Rusia, Patriark Kirill, di Havana, Cuba. Menurut para analis, pertemuan itu merupakan batu pijakan bagi relasi kedua komunitas yang selama hampir 1000 tahun berpisah. Pertemuan ini dinilai untuk membahas langkah-langkah untuk mengakhiri keretakan panjang antar kedua Gereja, dan membangun upaya-upaya untuk mengakhiri penganiayaan orang Kristen di Timur Tengah.⁸

Angin pembaharuan yang dihembuskan oleh Konsili Vatikan II turut menerpa wajah Gereja Katolik Indonesia. Pada tahun 1966 didirikanlah PWI Ekumene yang bertugas mewakili Majelis Waligereja Indonesia (MAWI, sekarang KWI) dalam masalah hubungan antargama dan kepercayaan hingga sekarang.⁹ Sehubungan dengan gejala

⁷www.vaticaninsider.org; Internet, diakses 9 Pebruari 2016.

⁸Harian *Kompas*, Sabtu 13 Pebruari 2016, hlm. 9. Sebagaimana kita ketahui kapel ini merupakan tempat dimana Raja Hendri VIII pada tahun 1530 mengumumkan pemisahan diri dari Gereja Katolik dan tidak mengakui kekuasaan Paus di Roma, mengangkat dirinya sebagai Kepala Gereja Inggris dan mengumumkan perkawinannya dengan Anna Boleyn dan menyatakan pembatalan nikah dengan Chatarina dari Aragon.

⁹E. Armada Riyanto, *Dialog Interreligius, Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah* (Yogyakarta, Kanisius, 2010), 384-385. Menurut Armada, istilah “ekumene” yang digunakan di sini lebih merujuk pada “preferensi Gereja Katolik untuk membangun persekutuan dan kerja sama dengan umat Kristen lain.” Ibid., 385.

“proselitisme”¹⁰ yang makin meluas di tanah air maka pada tahun 1966 MAWI meminta Roma menyusun *Directorium De Re Oecumenica* untuk daerah-daerah misi. Usaha ini dilanjutkan dengan terjemahan Alkitab Ekumenis tahun 1968. Keterlibatan Gereja Katolik Indonesia dalam gerakan ekumene dan dialog antaragama menemukan bentuknya pada periode tahun 1970-1975, melalui kebijakan pastoral dan aneka pertemuan dialogal. Pada tahun 1970, MAWI mengeluarkan *Pedoman Umat Katolik Indonesia* yang juga berisi tentang kerjasama antaragama.

Pada tahun 1975 PWI Ekumene diubah namanya menjadi PWI Hubungan Antargama dan Kepercayaan (HAK). Lembaga ini bertugas menggalang usaha-usaha ekumenis dan dialog antaragama dan kepercayaan melalui kegiatan studi, pertemuan dan berbagai kegiatan lain.¹¹ Upaya kerjasama ini berlangsung sampai sekarang dalam bentuk pesan natal bersama PGI-KWI, terjemahan bersama Kitab Suci, Ibadat bersama, kerja sama kemanusiaan, dialog antar PGI-KWI, dan lain sebagainya.

2. Prinsip dan Tujuan Ekumene Menurut Gereja Katolik

2.1. Prinsip Ekumene

Menurut Gereja Katolik, skisma yang melahirkan Gereja-Gereja non-Katolik tidak bisa dikenakan pada satu pihak saja, entah Gereja Katolik maupun Gereja Protestan, karena “kadang-kadang bukan karena kesalahan kedua belah pihak” (UR 3). Oleh karena itu, walaupun berbeda dalam beberapa hal, Gereja Katolik tetap mengakui dan merangkul

¹⁰Proselitisme adalah upaya memurtadkan seseorang dari agamanya dan menggiringnya untuk memeluk iman lain dengan cara yang tidak fair.

¹¹Ibid., 389.

anggota Gereja non-Katolik sebagai “saudara dan saudari di dalam Tuhan” (UR 3).

Pengakuan itu secara jelas diungkapkan oleh Konsili Vatikan II: “Gereja Katolik merangkul mereka dengan sikap bersaudara penuh hormat dan cinta kasih. Sebab mereka itu, yang beriman akan Kristus dan dibaptis secara sah, berada dalam suatu persekutuan dengan Gereja Katolik, baik perihal ajaran dan adakalanya juga dalam tata-tertib, maupun mengenai tata-susunan Gereja, persekutuan gerejawi yang sepenuhnya terhalang oleh cukup banyak hambatan, diantaranya ada yang memang agak berat.” (UR 3).

2.2. Tujuan Ekumene

Tujuan gerakan ekumenis adalah mengatasi hambatan-hambatan dalam hal dogma, magisterim dan hirarki. Tujuan lain yang lebih bersifat etis-sosial ialah lebih terwujudnya “nilai-nilai keadilan dan kebenaran, kerukunan dan kerja sama, semangat persaudaraan dan persatuan” (UR 3). Memang diakui, di satu pihak, bahwa ada perbedaan antara Gereja Katolik dan Gereja non-Katolik. Namun, di lain pihak, Konsili mengakui bahwa justru perbedaan dalam ritus liturgi, kehidupan rahmat, iman, harapan dan cinta kasih, dan berbagai kurnia Roh Kudus yang kelihatan, “dapat menyalurkan hidup rahmat yang sesungguhnya, dan harus diakui dapat membuka pintu memasuki persekutuan keselamatan.” (UR 3).

Secara indah E. Yarnold, mengungkapkan kekayaan perbedaan dalam Gereja itu sebagai berikut: “It is not difficult to see why such diversity in unity within the Church is not only tolerable but even desirable. The human mind with its limitations is incapable of comprehending the infinite richness of the truth about God and His

dealings with human race... we therefore need different attempts to understand God so that a composite picture can be built up.”¹²

3. Menuju Perjumpaan Sejati Agama-Agama di Maluku

Pertanyaan sentral yang kemudian muncul ialah bagaimana “ekumene Gereja” dapat menjadi sarana untuk membangun perjumpaan sejati agama-agama menuju sebuah “ekumene agama-agama” di Maluku di tengah realitas sosial yang khaotik dewasa ini?

Dalam tulisan ini jawaban atas pertanyaan ini bertitik tolak pada rekomendasi Konsili Vatikan II tentang berbagai upaya praktis untuk melaksanakan kegiatan ekumene. Upaya-upaya praktis itu kemudian mendapatkan bobot kritis berdasarkan prinsip-prinsip etika kristiani.

3.1. Pembaharuan Institusional

Gereja-Gereja dan agama-agama di Maluku perlu membaharui diri pada tataran sistem dan struktur institusi keagamaan masing-masing (bdk. UR 6). Tuntutan etis pembaharuan institusional ini mengandaikan adanya kemampuan para pemimpin agama untuk menata institusinya secara rasional, entah dalam bidang administrasi maupun dalam sistem dan struktur kepemimpinan.

Kita tidak dapat menafikkan bahwa seringkali perjumpaan agama-agama dan para penganutnya tidak dapat berjalan dengan baik karena sifat eksklusif dan klaim dogmatis yang kurang dipahami secara tuntas dan kritis, baik oleh pemimpin maupun penganut agama yang bersangkutan. Hal ini membawa ketakutan buta terhadap institusi keagamaan tertentu

¹²Dikutip dalam Karl H. Peschke, *Chrisatian Ethics. Moral Theology in the Light of Vatican II*, vol 2: *Special Moral Theology*, revised edition (Manila: Logos Publications, 2001), 42-43.

dan kekakuan psikis-emosional dalam praksis operasional institusi keagamaan tersebut.

Pembaharuan institusi keagamaan memang tetap harus berdasar pada dogma atau akidah resmi agama yang bersangkutan. Namun seringkali pembaharuan itu sangat tergantung pada manusia yang menjalankan institusi itu. Pembaharuan institusional agama-agama menuntut bahwa para pemimpin dan penganutnya, meminjam istilah Paus Fransiskus, tidak membiarkan diri mereka terbuai oleh pelaku institusi yang suka berbohong dan menjilat demi mencari dan mengumpulkan harta benda duniawi. Lebih dari itu, para pemimpin dan penganutnya tidak menerapkan legalisme dan klerikalisme tanpa kebebasan yang meniadakan eksistensi agama-agama sebagai *sacramentum salutis* bagi semua orang.¹³ Dengan demikian, prinsip *kebenaran* harus diwujudkannyatakan dalam pembaharuan institusi keagamaan.

3.2. Pembaharuan Spiritual

Menurut Konsili pembaharuan spiritual secara internal gerejani dapat dilaksanakan melalui “gerakan Kitab suci dan Liturgi, pewartaan Sabda Allah dan katekese, kerasulan awam, bentuk-bentuk baru hidup religius, spiritualitas perkawinan, ajaran serta kegiatan gereja di bidang sosial” (UR 6). Namun semua hal itu tidak cukup.

Gereja menekankan pembaharuan terlebih dengan mengusahakan *pertobatan batin* sebab kegiatan ekumene pertama-tama adalah masalah batin manusia dengan Tuhan dan sesama. Konsili Vatikan II mengatakan: “Tidak ada ekumenisme sejati tanpa pertobatan batin. Sebab dari pembaharuan hati, dari ingkar diri dan dari kelimpahan cinta kasih yang

¹³ www.zenit.org; Internet, diakses 15 Pebruari 2016.

sebenarnya ikhlaslah kerinduan akan kesatuan timbul dan makin menjadi masak” (UR 7).

Bagi masyarakat Maluku yang pernah mengalami konflik horizontal, pembaharuan batin menjadi sangat penting untuk membebaskan para penganut agama dari rasa dendam, isi hati, dengki, permusuhan, dan pengalaman traumatis yang mendalam. Semua unsur emosional ini bersifat destruktif bagi perjumpaan sejati agama-agama dan para penganutnya di Maluku. Sikap etis yang ditekankan dalam pembaharuan spiritual ini adalah ketulusan, kerendahan hati, kejujuran, kelemahan lembut, kemurahan hati dalam persaudaraan antar sesama umat beragama.

3.3. Doa Bersama

Konsili mengatakan bahwa doa bersama merupakan “jiwa seluruh gerakan ekumenis” (UR 8). Sebagai orang beriman, kita sungguh percaya bahwa doa merupakan komunikasi personal manusia dengan Tuhan. Doa merupakan kekuatan spiritual yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan secara benar ajaran dan praktek keagamaan.

Untuk memajukan persekutuan agama-agama di Maluku maka setiap pemimpin dan penganut agama yang satu harus menghargai waktu, praktek dan aturan-aturan doa dari agama dan penganut yang lain. Gereja Katolik sendiri walaupun membenarkan doa bersama, namun mengharapkan umatnya tidak menggunakan Sakramen-Sakramen secara acak-acakan untuk memulihkan kesatuan umat kristen. Maka perlu diperhatikan dua prinsip, yaitu (1) umat lain diizinkan mengikuti perayaan, namun (2) mengenai cara bertindak konkrit, harus mendapat

izin dari Uskup Diosis, Konferensi Uskup, atau oleh Takhta Suci (bdk. UR 8).

Kadang terasa bahwa kita begitu menekankan perbedaan bentuk dan waktu doa secara formal daripada Tuhan yang disembah dan dipuji melalui doa-doa kita. Bahkan lebih dari itu, kita menggunakan doa secara salah untuk menghakimi, mengutuk dan mencelakakan para pemimpin dan penganut agama lain. Pembaharuan relasi dan upaya kesatuan agama-agama di Maluku dapat terjadi dengan baik apabila kita menjadikan doa sebagai “upaya yang sangat efektif untuk memperoleh rahmat kesatuan, serta merta menjadi lambang otentik” (UR 8) untuk menjalin persatuan dengan agama dan penganut yang lain.

3.4. Saling Mengenal Sebagai Saudara

Konsili menegaskan bahwa proses mengenal satu sama lain sebagai saudara dapat ditempuh melalui dua cara, yakni melalui pengenalan dogma dan doxa (dialog intelektual) dan melalui keterlibatan hidup satu sama lain (dialog kehidupan).

3.4.1. Melalui Dialog Intelektual

Gereja Katolik memahami dialog intelektual sebagai jalan untuk memahami dengan benar sesama saudara lain. Proses pemahaman timbal balik ini “harus ditempuh dengan menjunjung tinggi kebenaran dan dengan hati terbuka” (UR 9). Tujuan utama dialog intelektual adalah, di satu pihak, untuk meningkatkan pengertian umat Katolik “tentang ajaran dan sejarah, hidup rohani dan peribadatan, psikologi agama dan kebudayaan, yang khas menyangkut saudara-saudari yang terpisah” (UR 9). Namun di pihak lain, dialog ini dimaksudkan pula agar umat beragama

lain mendapat penjelasan yang lebih baik tentang iman Katolik (bdk. UR 9).

Dialog intelektual menjadi sangat penting dalam upaya perjumpaan agama-agama di Maluku karena merupakan sarana bagi kaum beragama dari berbagai tradisi keagamaan yang berbeda untuk membuka diri secara tulus, untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan bersama guna mencapai sebuah keadilan abadi. Menurut Paus Fransiskus, sebuah budaya yang ditandai dengan dialog sebagai sebuah bentuk perjumpaan merupakan sebuah ciri masyarakat yang responsif dan inklusif (bdk. EG 239).

Dalam membangun perjumpaan sejati agama-agama di Maluku, prinsip etis yang harus senantiasa diperhatikan ialah bahwa penolakan terhadap klaim kebenaran absolut yang diproklamasikan oleh agama atau penganut agama tertentu hendaknya tidak serta merta memposisikannya sebagai musuh. Sebaliknya, penolakan hendaknya dimaknai sebagai tanda cinta kasih dan perhatian kepada kebenaran yang juga digumuli oleh pihak opponent. Perhatian kepada pihak yang berbeda pandangan dengan kita merupakan wujud pengosongan diri terhadap klaim kebenaran yang ditawarkan dan sekaligus sarana tepat untuk menghindari bahaya dogmatisme kebenaran yang diwujudkan dalam bentuk kekerasan fisik.

3.4.2. Melalui Dialog kehidupan

Dialog kehidupan merupakan tindakan *proeksistensi* terhadap sesama. Tindakan ini bukan hanya usaha untuk hidup bersama secara damai (*koeksistensi*) melainkan terlebih aktif mengusahakan pemanusiawian sesama manusia. Tindakan proeksistensi tak lain adalah tindakan memanusiakan manusia, artinya usaha untuk terlibat aktif dalam

mengusahakan kebaikan sesama sebagaimana kita mengusahakan kebaikan diri sendiri.

Tindakan proeksistensi dalam konteks dialog kehidupan agama-agama di Maluku pada dasarnya bersifat transformatif, artinya memiliki kekuatan pembebasan terhadap sesama dari “keterasingan berada di tengah-tengah umat beragama lain.”¹⁴ Dalam ranah publik sosial-politik, aspek transformatif dialog kehidupan menjadi nyata dalam perhatian dan solidaritas dengan orang sakit, miskin, termarginalisasi, terpenjara, dan sebagainya. Solidaritas kemanusiaan ini harus menjadi gerakan bersama agama-agama di Maluku sehingga agama-agama semakin signifikan dan relevan bagi semua orang. Gerard Mannion mengungkapkan dengan sangat baik esensi solidaritas itu dengan mengatakan: “Solidarity has to be more than a battle cry or a general notion of intellectual agreement; it must translate into concrete forms of action.”¹⁵

3.5. Pendidikan Ekumenis

Salah satu cara untuk memajukan ekumene agama-agama di Maluku adalah melalui bidang pendidikan. Tuntutan pendidikan ekumenis ini, terutama diarahkan kepada para calon pemimpin umat. Pendidikan ini harus diberikan dalam cahaya ekumenis agar terpancar cahaya kebenaran, bukan polemik, terutama menyangkut hubungan dengan Gereja-Gereja dan agama-agama lain-lain (bdk. UR 10).

¹⁴Aloysius Pieris, *An Asian Theology of Liberation* (Quezon City: Claretian Publication, 1988), 61-62.

¹⁵Gerard Mannion, “Driving the Haywain: Where Stands the Church ‘Catholic’ Today?” dalam Gesa Elsbeth Thiessen (ed), *Ecumenical Ecclesiology Unity, Diversity And Otherness in A Fragmented World* (London: T&T Clark, 2009), 22.

Apa saja yang harus diperhatikan dalam pendidikan ekumenis agama-agama di Maluku? Sambil memperhatikan apa yang ditetapkan oleh Konsili saya menyebut juga beberapa agenda pendidikan ekumenis untuk dipertimbangkan bersama dalam rangka membangun perjumpaan sejati agama-agama di Maluku.

Pertama, pendidikan metode penyiaran agama di ruang publik. Agenda pendidikan ini menjadi amat penting agar setiap calon pemimpin agama mengetahui cara dan metode yang tepat untuk menyiarkan ajaran dan praktek agamanya di hadapan umat beragama lain.

Kedua, pendidikan suara hati. Para calon pemimpin harus mendapatkan pendidikan suara hati dengan tujuan agar mereka mampu mengambil keputusan secara tepat, obyektif dan rasional dalam keadaan konflik. Calon pemimpin yang terlatih dalam suara hatinya akan mampu meniadakan sikap “suka damai palsu”. Sikap ini akan merugikan pengakuan iman yang asli dan otentik dari masing-masing agama, serta tujuan persekutuan yang ingin dibina bersama (bdk. UR 11).

Ketiga, pendidikan “etika pelayanan”. Istilah etika pelayanan merujuk pada prinsip-prinsip moral yang harus diketahui seorang pelayan umat dan diwujudkan dalam karakter-karakter etis seperti hidup suci, jujur, dapat dipercaya, sederhana (*simplicity*), memiliki integritas (*integrity*) dan akuntabilitas (*accountability*).¹⁶

Keempat, pendidikan tentang “komunitas para pemimpin agama”. Komunitas yang dimaksud adalah komunitas para sahabat, yang didasarkan pada hubungan eksistensial yang mendalam antar individu,

¹⁶ Bdk. Richard M. Gula, *Ethics in Pastoral Ministry* (New York: Paulist Press, 1996), 5. Lih. David Atkinson, *Pastoral Ethics* (Oxford: Lynx Communications, 1994), 7-9.

yang terealisasi dalam kerangka konsep komunitas perjanjian kudus, tempat di mana berbagai macam kepribadian yang mendalam saling berhubungan satu sama lain secara ontologis, serta memiliki komitmen total kepada Allah dan sesama manusia, sebagai warna dari fungsi dan tugas kita sehari-hari.¹⁷

Kelima, pendidikan Hak-hak Asasi Manusia. Pendidikan ini merujuk pada kemanusiaan universal sebagai prinsip pemersatu seluruh umat manusia, dengan menunjukkan rasa empati terhadap orang lain dan bekerja dalam semangat kekeluargaan dalam upaya memecahkan problem-problem bersama.¹⁸

Penutup

Perjumpaan merupakan sebuah dambaan dan panggilan etis Gereja dan agama-agama untuk membangun perdamaian abadi. Dalam realitas sosial khaotik dewasa ini, panggilan kepada “ekumene agama-agama” menjadi sebuah *condition sine qua non* yang tak dapat ditunda lagi. Ekumene agama-agama di Maluku harus bersifat transformatif dengan membangun solidaritas kemanusiaan. Dengan tetap menghargai kekhasan agama-agama lain, setiap umat beragama harus melakukan peleburan horizon dalam proses belajar bersama sehingga tidak jatuh pada membenaran klaim agama secara sempit. Hal ini dapat diantisipasi melalui pendidikan ekumenis agama-agama.

¹⁷Bdk. Samuel H. Canilingan, *Komunitas Religius: Panduan Kehidupan Komunitas bagi Kaum Religius* (Medan: Bina Media Perintis, 2008), 12.

¹⁸Tim Murithi, *The Ethics of Peacebuilding* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009), 154.

Daftar Kepustakaan

- Amstrong, Karen. *The Battle for God*. New York: Random House, 2000.
- Atkinson, David. *Pastoral Ethics*. Oxford: Lynx Communications, 1994.
- Canilingan, Samuel H. *Komunitas Religius: Panduan Kehidupan Komunitas bagi Kaum Religius*. Medan: Bina Media Perintis, 2008.
- Fitzgerald, Thomas E. *The Ecumenical Movement. An Introductory History*. New York: Greenwood Publishing Group, 2004.
- Fransiskus, Paus. *Evangelii Gaudium. Seruan Apostolik. 24 November 2013*. Terjemahan F.X. Adisuseno dan Bernadeta H. Tri Prasasti. Editor Martin Harun OFM dan T. Krispurwana Cahyadi SJ. Jakarta: DOKPEN KWI, 2014.
- Gula, Richard M. *Ethics in Pastoral Ministry*. New York: Paulist Press, 1996.
- Harian Kompas, Sabtu 13 Pebruari 2016.
- Heuken, Adolf. *Ensiklopedi Gereja, Vol. I: A-G*. Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1991.
- Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Terjemahan R. Hardawirya. Jakarta: Obor, 2004.
- Mannion, Gerard. "Driving the Haywain: Where Stands the Church 'Catholic' Today?" Dalam Gesa Elsbeth Thiessen. Editor. *Ecumenical Ecclesiology Unity, Diversity And Otherness in A Fragmented World*. London: T&T Clark, 2009.
- Murithi, Tim. *The Ethics of Peacebuilding*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009.
- Peschke, Karl H. *Christian Ethics. Moral Theology in the Light of Vatican II, vol 2: Special Moral Theology*. Revised Edition. Manila: Logos Publications, 2001.
- Pieris, Aloysius. *An Asian Theology of Liberation*. Quezon City: Claretian Publication, 1988.
- Riyanto, E. Armada. *Dialog Interreligius, Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah*. Yogyakarta, Kanisius, 2010.

Sunardi, St. "Dialog: Cara Baru Beragama. Sumbangan Hans Küng bagi Dialog Antaragama." Dalam Elga Sarapung, et. all. Editors. *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.

The Parliament of the World's Religions. *A Global Ethics: The Declaration of the Parliament of the World's Religions*. With commentaries by Hans Küng and Karl-Josef Kuschel. New York: Continuum, 2004.

www.vaticaninsider.org; Internet, diakses 9 Pebruari 2016.

www.zenit.org; Internet, diakses 15 Pebruari 2016.